

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah adalah bagian penting untuk pencapaian tujuan Pembangunan Nasional. Dimana dalam ketentuan pasal 1 angka 33 UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan demikian pembangunan Daerah harus dilakukan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang selalu berubah secara dinamis. Mengingat pembangunan Daerah harus mampu mengakomodir dua aspirasi sekaligus, yakni aspirasi pemerintah atasan dan aspirasi masyarakat. Karena persoalannya sekarang di setiap kabupaten/kota bagaimana menyelaraskan antara kebijakan dari atas (pemerintah, baik pusat maupun Provinsi) dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya masing-masing.

Pembangunan merupakan salah satu proses untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi. Kabupaten Sampang telah ditetapkan sebagai daerah tertinggal dibandingkan dari ke empat daerah di Pulau Madura ini, serta menjadi prioritas pembangunan Daerah tertinggal di Pulau Madura. Kabupaten Sampang merupakan wilayah yang tertinggal di Provinsi Jawa Timur, hal tersebut diindikasikan oleh adanya kondisi perekonomian dan kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah, serta infrastruktur yang belum memadai.

Dimana dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 bahwa Partisipatif adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan,

melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Partisipasi masyarakat dalam keterkaitan pembangunan merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dimana berhasil tidaknya suatu program pembangunan dalam suatu wilayah. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan karena program pemerintah tidak lain untuk mensejahterakan masyarakat. Glently (2016) (Davis 2005: 75)

Dalam hal tersebut pemerintah diharapkan dapat menjalankan pendekatan menumbuhkan keterkaitan masyarakat terhadap program yang dijalankan, masyarakat akan merasakan memiliki jika dalam semua pelaksanaan program pembangunan diikutsertakan itu artinya pemerintah memberikan hak kepada masyarakat dalam program pembangunan yang ada di wilayah tersebut. Partisipasi masyarakat bukan hanya ide-ide pemikiran dalam usulan dikegiatan pelaksanaan musrenbang, akan tetapi partisipasi masyarakat bisa juga partisipasi dalam hal tenaga, dan partisipasi dalam bentuk uang.

Menurut Sumaryadi (2005:46) mengatakan bahwa partisipasi yaitu peran serta individu maupun kelompok masyarakat yang mengikuti dalam proses pembangunan baik berupa pernyataan ataupun dalam bentuk kegiatan akan tetapi memberikan saran ataupun masukan dalam pembangunan misalnya, sebuah pikiran untuk pembangunan, tenaga, waktu, yang paling penting adalah skill/kreatif, modal, serta ikut dalam memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil dari pembangunan.

Keterlibatan masyarakat sangat perlu untuk perencanaan pembangunan, hal tersebut karena pembangunan yang terlalu menekan ke pemerintah birokrasi atau *top down* mendapatkan kritikan karena hal tersebut kurang peka terhadap kebutuhan masyarakat dan dari pada itu dimana pelaksanaan yang mengutamakan masyarakat dalam perencanaan program-program pembangunan berarti memberikan peluang seluas-luasnya terhadap masyarakat hal tersebut untuk mengarahkan sumber daya, potensi merencanakan serta membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang mensejahterakan mereka, sehingga mereka tidak hanya menikmati hasil dari pembangunan akan tetapi mereka bisa mengikutsertakan mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya.

Definisi dari partisipatif yaitu merupakan keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong untuk berkontribusi terhadap tujuan kelompok dan mempertanggungjawabkan keterlibatannya. Dapat dilihat dari pendapat para ahli diatas, dapat dikatakan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan yaitu suatu langkah keberhasilan dalam pembangunan. Davis (2000:142)

Perencanaan pembangunan partisipasi adalah perencanaan yang bertujuan dimana untuk melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dimana secara langsung tersebut yaitu keterlibatan masyarakat akan memperjelas apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat hal tersebut akan terhindar dari kata manipulasi, semakin tinggi jumlah mereka maka akan semakin baik untuk memberi nilai tambah pada legitimasi, serta pemerintah sadar akan keterampilan masyarakat. Perencanaan pembangunan disusun berdasarkan permasalahan dan kebutuhan yang dekat dengan

kehidupan masyarakat, hal tersebut akan mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat.

Program pembangunan partisipatif muncul karena adanya keterbatasan anggaran yang kurang dari pemerintah. Dimana faktor pendorong berikutnya karena adanya empirik bahwa pembangunan yang seharusnya di jalankan dan direncanakan oleh pemerintah ternyata hasilnya tidak efektif. Pembangunan yang tidak berkelanjutan tersebut sehingga masyarakat tidak memiliki dan merasakan, hal tersebut telah terjadi pada tahun 1970 sampai tahun 1980. Adanya pembangunan partisipatif maka dari faktor tersebut dapat diatasi. Timbulnya pembangunan partisipatif untuk menguatkan rasa tanggung jawab pemerintah di masing-masing Daerah dan masyarakat, sehingga pencapaian pembangunan akan lebih terjamin keberhasilannya serta membantu proses pelaksanaan program secara teknis.

Proses perencanaan pembangunan Daerah dilakukan melalui serangkain forum dengan melibatkan seluruh unsur pembangunan di Daerah Kabupaten Sampang. Unsur pelaku perencanaan pembangunan daerah tersebut tidak hanya melibatkan aparatur-aparatur atau lembaga-lembaga tinggi, akan tetapi juga elemen-elemen warga masyarakat, elemen- elemen tersebut yaitu lembaga-lembaga kemasyarakatan, pemerintah desa/kelurahan, pemerintah Kabupaten (SKPD terkait), LSM dan institusi lain yang terkait, perencanaan pembangunan seperti inilah yang dimaksud sebagai perencanaan pembangunan partisipasi.

Sistem perencanaan sebelumnya yang mana menganut tentang pendekatan *top-down* dimana dianut dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 yaitu aturan pelaksanaan menekankan kombinasi pendekatan antara *top-down* dan *bottom-up* dimana hal

tersebut lebih menekankan aspiratif dan partisipatif. Pendekatan *top-down* pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan hal tersebut telah mendorong kemunculan perhatian pada peranan partisipasi masyarakat serta pentingnya memahami dinamika masyarakat dan pemerintah Daerah serta interaksinya dengan pemerintahan yang lebih tinggi (Dalam : Etal,2003)

Untuk memperoleh keberhasilan pembangunan maka banyak aspek-aspek yang terlibat dalam pembangunan dan aspek-aspek yang perlu diperhatikan, yaitu dimana keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat pada proses-proses perencanaan yang akan memberikan output yang lebih optimal. Dimana semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pencapaian pembangunan. Supaya pencapaian keberhasilan pembangunan Daerah Kabupaten Sampang maka hal tersebut segala program Perencanaan, Pelaksanaan, serta Evaluasi pembangunan, karena hal tersebut merekalah yang lebih mengetahui permasalahan serta kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya serta mereka juga nantinya yang akan menilai dan memanfaatkan tentang berhasil tidaknya pembangunan di Daerah Kabupaten Sampang.

Sebagai dokumen perencanaan strategi daerah, RPJMD merupakan kelaborasi visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam agenda, tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan pembangunan daerah, program Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dan Dokumen RPJMD adalah salah satu dokumen yang masa kerjanya bersamaan dengan masa jabatannya Kepala Daerah. Oleh sebab itu untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal pada semua tingkatan pemerintahan

maka proses penyusunan RPJMD ini senantiasa mengacu kepada RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Provinsi Jatim, RPJM Provinsi Jatim, RPJPD Sampang, RPJMD Sampang, RTRW Sampang dan Kabupaten sekitarnya

Agar tercapainya keberhasilan pembangunan daerah, maka segala program perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat karena merekalah yang memahami serta mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya serta mereka juga yang nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang keberhasilan pembangunan tersebut.

Dengan alasan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “tingkatan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang pada penyusunan RPJMD kabupaten Sampang Tahun 2019-2024”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana tingkatan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang pada penyusunan RPJMD kabupaten Sampang Tahun 2019-2024”

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui “Bagaimana tingkatan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang pada penyusunan RPJMD kabupaten Sampang”

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1. Manfaat Secara Praktis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan informasi tambahan bagi pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten dalam tingkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang penyusunan RPJMD Kabupaten Sampang
2. Menambah daftar pustaka baru yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa

1.4.2. Manfaat secara teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mengenai perencanaan daerah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan penyusunan perencanaan pembangunan
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika